

TAJUK RENCANA

Lantangkan Komitmen Antikorupsi Dunia Usaha

TIADA hari tanpa berita korupsi. Ini fakta! Mengingat pemberitaan tentang korupsi seakan tak pernah berhenti. Kisah penangkapan mulai penyergapan, operasi tangkap tangan hingga buron yang masih dalam DPO ada dalam kasus korupsi negeri ini. Ironisnya, para pelaku korupsi adalah para pegawai atau pejabat pemerintahan yang menempati posisi strategis. Kurangkah yang mereka dapat sehingga masih harus korupsi?

Pertanyaan tersebut acap kali muncul dan terdengar di masyarakat. Dan kian beragam pula jawaban akan alasan seseorang melakukan korupsi. Penulis Jack Bologna yang dikutip *laman aclc.kpk.go.id* mengungkap factor penyebab korupsi adalah keserahan (*greedy*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*need*) dan pengungkapan (*exposure*). Mirisnya, factor-faktor dalam Teori GONE ini berjaln berkelindan dan menguatkan.

Sifat serakah berpotensi dimiliki setiap orang. Dan dalam teori GONE dijelaskan, koruptor pada dasarnya serakah dan tidak pernah puas. Keserakahan ditambah ada kesempatan, akan menjadi katalisator terjadinya tindak pidana korupsi. Korupsi akan semakin menggila karena gaya hidup hedonis yang tidak bisa dihindari. Apalagi pengungkapan atau penindakan atas pelaku hanya enteng-enteng saja, tidak menimbulkan efek jera.

Keserakahan karena ingin monopoli proyek-proyek membuat para pelaku usaha seperti disebut Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdijanto Sudjadi, terjerat korupsi. Mereka, adalah 371 pengusaha yang ingin proyek di suatu daerah dan ingin mendapatkan prioritas tanpa mengikuti prosedur aturan yang berlaku seperti misal pengu-rusan perizinan. Dan mereka 'bertemu' pejabat pemerintah yang serakah, ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara. Keserakahan yang membawa dampak sangat berbahaya. Ketika jika

dunia usaha dijadikan ladang tindak pidana korupsi, maka hasil atau kualitas layanan yang didapat tidak akan maksimal. (KR, 28/5).

Semua dengan modus yang sudah lama dan paling banyak dilakukan adalah dengan penyua-an atau pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gratifikasi adalah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Dalam situs resmi KPK, dijelaskan, yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pengertian ini tercantum dalam UU Nomor 20/2021 penjelasan pasal 12b ayat (1).

Itulah sebab gratifikasi perlu dilaporkn. Karena korupsi sering berawal dari kebiasaan yang tidak disadari pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara lewat penerimaan hadiah dari pengusaha dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian fasilitas yang tidak wajar. Dan hal ini akan menjadi kebiasaan bila dibiarkan terus berlangsung. Inilah sebab ASN dilarang menerima bingkisan lebaran apalagi dari pengusaha.

Gratifikasi adalah suatu tindakan yang menjadi awal mula dari kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gratifikasi adalah pelanggaran hukum seperti yang tertera pada Pasal 12B dan Pasal 12C UU No 20 Tahun 2001. Kini, KPK berkomitmen mendorong pelaku usaha dan asosiasi agar tidak terlibat praktik pidana korupsi bagi dunia usaha. Untuk itu, pendekatan penindanan harus dibarengi pendekatan pendidikan dan pencegahan. Tentu, komitmen antikorupsi dunia usaha yang didukung secara multisectoral, terus dilantangkan. Harus diakui, ini bukan pekerjaan ringan. Bahkan sangat berat dan tidak mudah. □f

MELIHAT angka 1.200 dari 3.300 jemaah haji DIY 2023 adalah lanjut usia (lansia) terasa bila daerah istimewa ini memiliki banyak warga lansia. Apalagi tercatat jumlah penduduk DIY (2018) mencapai 3.664.669 dengan lansia 552.200 (BPS, 2019). Secara rinci, lansia yang hidup sendiri mencapai 123.772 dan yang membuat miris, 46.242 lansia hidup terlantar. Diperkirakan, angka itu sudah lebih tinggi di 2023 ini.

Kondisi kesehatan yang baik, membuat usia harapan hidup di DIY menjadi tinggi, 74,82 tahun. Tentu, pemerintah juga harus siap dan menyediakan langkah konkret memastikan kesejahteraan lansia. Apalagi trend kehadiran lansia akan terus meningkat. ***

DISEBUT sebagai provinsi dengan persentase laju lansia tertinggi secara nasional, jumlah lansia di DIY pun di atas rata-rata nasional. Banyak faktor penyebabnya. Viral sebagai provinsi termiskn dan sebagian kalangan muda mengakui bukan tempat mencari uang yang ideal, namun falsafah Jawa *alon-alon waton kelakon* membuat DIY terasa nyaman dan menjadi pilihan tinggal di hari tua. Setelah puluhan tahun bekerja di pelbagai wilayah di Indonesia, saat pension memilih tinggal di DIY.

Tingginya lansia tentu akan menghadirkan pelbagai macam problema. Dan persoalan yang dihadapi lansia bukan sekadar soal ekonomi. Karena dalam masyarakat Jawa terdapat kearifan lokal *mikul dhuwur mendhem jero* yang dalam terminologi Islam dikenal dengan *birrul walidain* menekankan kewajiban anak untuk berbakti dan mengabdikan orang tuanya. Namun problemnya memang tidak sekadar kesejahteraan.

Jepang, salah satu negara yang sudah lebih awal berhadapan dengan fenomena *super aging society*. Jumlahnya yang tinggi, membuat pemerintah merumuskan pelbagai program yang memastikan lansia terjamin lewat pekerjaan yang 'seperti tia-

Fadmi Sustiwi

da makna' penulis lihat : menghentikan pejalan kaki di kawasan trotoar karena ada kendaraan ke luar dari gedung kantor, membuka ñ menutup pintu gedung yang kalau di Indonesia sudah dibuat otomatis serta lainnya. Kebijakan Pemerintah Jepang membuat lansia tersebut berdaya dan merasa berpartisipasi pada negara.

Mungkinkah hal tersebut dilakukan di Indonesia khususnya di DIY? Tidak semu-



dah membalikkan tangan. Lontaran kalimat *ikasihlan sudah tua harus bekerjai atau ianak-anaknya apa tidak mengurus ya?i*. Ada pula *ilho beliau kan mantan pejabat, kasihan sekarang bekerja seperti itu?i*. akan didengar. Dan anak ñ jika ada ñ pasti akan menjadi pusat tudingan : tidak berbakti.

Cukup banyak regulasi tingkat undang-undang maupun perda untuk melindungi lansia. Jika belum sempurna, bukan menjadi alasan menafikan keberadaan atau eksistensi lansia. Namun dicari celah menyempurnakan dan membuat lansia bahagia sejahtera. ***

Pendidikan Perdamaian, Selamatkan Masa Depan

Farid Setiawan

Kritik keras yang tidak dapat dibiarkan mengingat fenomena kekerasan di sekolah sudah menjalar ke daerah-daerah di Indonesia, termasuk DIY. DIY sebagai Kota Pelajar perlu menjadikan upaya penanganan kekerasan di sekolah sebagai program prioritas. Agenda strategis ini perlu dirancang. Upaya ini perlu dilakukan karena tindak kekerasan di sekolah jelas bertentangan dengan misi DIY yang salah satunya hendak mewujudkan dan meningkatkan harmoni kehidupan masyarakat berdasarkan toleransi, tenggang rasa, kesantunan dan kebersamaan.

Upaya yang cukup penting digalakkan di DIY adalah diseminasi dan implementasi pendidikan perdamaian di lingkungan sekolah. Upaya ini diharapkan mampu melahirkan iklim kehidupan di sekolah yang penuh kedamaian, harmonis dan ketenteraman. Ekosistem seperti ini niscaya dapat terwujud karena pendidikan perdamaian tidak sekadar konsep yang diarahkan pada pembentukan pengetahuan.

Perwujudan ekosistem demikian itu perlu didukung dengan pembentukan budaya sekolah yang kondusif sehingga tercipta lingkungan yang penuh kedamaian. Nilai-nilai pendidikan perdamaian, seperti penghargaan atau *respect* terhadap perbedaan agama, suku, jender, budaya dan bentuk fisik perlu ditanamkan dalam diri pelajar, baik melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler maupun ekstra kurikuler.

Catur Pusat

Tentu, dalam mewujudkan ekosistem berbasis budaya damai itu tidak dapat dilakukan sendirian oleh pihak sekolah. Banyak pihak, *wa bil khusus*, catur pusat pendidikan perlu turut andil dan hadir dalam merealisasikan

29 MEI, diperingati sebagai Hari Lansia Nasional. Peringatan didasari sejarah ketika Dr KRT Radjiman Wedyodiningrat didaulat peserta sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk menjadi pimpinan sidang, 29 Mei 1945. Meski paling *sepuh*, Dr Radjiman (66) selalu berpikiran cemerlang. Tahun 1996 tanggal tersebut dicanangkan Presiden Soeharto, sebagai Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN).

Derajat kesehatan membaik, tingkat keberdayaan lansia tidak bisa dabaikan. Apalagi lansia memiliki pengalaman kehidupan yang lebih dibanding yang muda. Namun selain akses dan layanan ramah lansia menjadi sangat penting, dukungan keluarga merupakan faktor kunci dari kebijakan dan sistem layanan lansia.

Filosofi *mikul dhuwur mendhem jero* di Yogya kian lengkap. Mengingat landasan pemerintahan secara eksplisit tertulis dalam RPJP Propinsi DIY, *Hamemayu Hayuning Bawana*. Filosofi ini dijadikan cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat yang *gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi tentrem, kerta raharja* (RPJM Propinsi DIY, 2009-2013). Rasa nyaman, membuat Yogya terus bergerak menuju 'Kota Lansia' □f

*) **Fadmi Sustiwi**, jurnalis *Kedaulatan Rakyat*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik

Naskah dikirim Email atau WA

 pikiranpembaca@gmail.com

 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Sampah di Kotak Tanaman di Depan Beringharjo

MENUNGGU jemputan sembari melihat keadaan di sekitar, membuat hati menangis. Bagaimana tidak? Ketika sedang berteduh di depan Pasar Beringharjo saya memperhatikan ke bawah. Ternyata lahan sekitar tanaman perindang itu tidak tertutup rapat, namun ditutup dengan besi semacam teralis jendela. Sehingga tampak kotakan tanah di bawahnya.

Yang membuat miris, ternyata di lahan sempit itu penuh dengan sampah plastic yang dibuang secara sembarangan oleh orang ti-

dak bertanggung jawab. Bahkan saya sempat melihat seorang bapak *sepuh* yang juga membuang sampah plastiknnya dan membe-lasakkan lewat celah besi, usai menikmati kudapannya. Mengapa tidak mau beranjak sedikit mengingat di depan pintu pasar terdapat tempat sampah?

Miris. Meski tutup besi bisa dibuka dan kemudian dibersihkan, namun plastik yang sudah terlanjur terkubur akan merusak tanah yang sedikit untuk hidupnya perindang tersebut. □f

*) **Ibu Yanti**, *Sagan Yogyakarta*

Parkir Becak-Andong di Malioboro Perlu Ditata

Melihat Yogya dengan angkutan tradisional andong dan becak, rasanya senang. Kota ini masih menghargai eksistensi angkutan tradisional. Dikala kota-kota lain melibas, Yogya memberi harapan dan kesempatan.

Namun ada yang perlu diperhatikan, karena banyaknya andong di Malioboro, kemudian mereka parkir di pinggir jalan Malioboro, tidak di ceruk jalan

karena sudah penuh becak. Sehingga kadangkala membuat kaget kendaraan dari luar kota, karena berjalan agak ke kanan ternyata di depan ada andong terparkir.

Saya setuju dan bangga dengan masih ada becak-andong di Malioboro, hanya parkir perlu ditata. □f

*) **Rani**, *Karangmalang Sragen*

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penasehat: Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP. Pujiyanto SPD, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP